

Pemerintah Siapkan Empat Skema Harga Listrik EBT untuk PLN

Oleh **Retno Ayuningtyas**

► **JAKARTA** – Pemerintah menetapkan empat skema harga beli listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari pengembang listrik swasta yang memanfaatkan sumber energi baru terbarukan (EBT), yakni harga *Feed in Tariff*, harga penawaran terendah, harga patokan tertinggi, atau berdasarkan kesepakatan. Hal tersebut tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres).

Harga *Feed in Tariff* diberlakukan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan ekspansi PLTS dan PLTB berkapasitas maksimal 20 megawatt (MW), serta *Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa* (PLTBm) dan *Pembangkit Listrik Tenaga Biogas* (PLTBg) termasuk proyek ekspansi maupun sisa produksi listrik (*excess power*) dengan kapasitas maksimal 10 MW.

Berikutnya, harga penawaran diterapkan untuk PLTS dan PLTB berkapasitas lebih dari 20 MW, serta PLTBm dan PLTBg lebih dari 10 MW.

Khusus harga patokan tertinggi hanya berlaku untuk PLTP. Sementara harga kesepakatan diterapkan untuk PLTA, PLTS, dan PLTB berkapasitas lebih dari 20 MW, PLTA peaker maupun proyek ekspansi dan penjualan *excess power* untuk semua kapasitas terkontrak, proyek ekspansi dan *excess power* PLTBm dan PLTBg berkapasitas lebih dari 10 MW, serta pembangkit listrik bahan bakar nabati (BBN) dan energi laut.

Mengacu lampiran Perpres tersebut, harga listrik energi terbarukan juga mempertimbangkan faktor lokasi pembangkit listrik yang menjadi faktor pengkali (F).



Surya Darma

Faktor lokasi ini terbagi dalam sembilan kelompok dengan besaran 1 sampai dengan 2. Besaran faktor lokasi ini semakin besar untuk daerah Indonesia bagian timur dan pulau-pulau kecil.

Lampiran Perpres juga menetapkan besaran harga pembelian listrik energi terbarukan berdasarkan kapasitas. Harga listrik energi terbarukan juga ditetapkan lebih tinggi di masa awal pembangkit listrik beroperasi, yakni di kisaran 12-15 tahun pertama. Selanjutnya, harga listrik dipatok lebih rendah hingga kontrak berakhir di tahun ke-30.

Sesuai lampiran, harga listrik per kilowatt hour (kWh) untuk

PLTA yang memanfaatkan aliran atau turunan air ditetapkan di kisaran US\$ 5,8 sen dikali F untuk kapasitas lebih dari 100 MW hingga tertinggi di US\$ 9,36 sen dikali F untuk kapasitas 3-5 MW. Berikutnya untuk PLTA yang memanfaatkan bendungan atau fasilitas lain milik Kementerian PUPR, harga listriknya US\$ 5,8 sen x 0,9 x F untuk kapasitas lebih dari 100 MW dan US\$ 10,55 sen x 0,9 x F untuk kapasitas di bawah 1 MW.

Untuk PLTS, harga listrik ditetapkan dari kisaran US\$ 6,5 sen x F untuk kapasitas lebih dari 20 MW hingga US\$ 10,8 sen x F untuk kapasitas maksimal 1 MW. Harga listrik PLTB yakni dari kisaran US\$ 10 sen x F untuk kapasitas di atas 20 MW hingga US\$ 13,18 sen x F untuk kapasitas di bawah 10 MW. Khusus PLTS dan PLTB, harga tersebut belum termasuk fasilitas baterai.

Berikutnya, harga listrik PLTBm ditetapkan dari kisaran US\$ 10,24 sen x F untuk kapasitas lebih dari 10 MW hingga US\$ 12,93 sen x F untuk kapasitas maksimal 1 MW. Harga listrik PLTBg ditetapkan dari kisaran US\$ 7,66 sen x F untuk kapasitas di atas 10 MW hingga US\$ 9,96 sen untuk kapasitas sampai dengan 1 MW.

Terakhir untuk PLTP, harga listriknya ditetapkan sebesar US\$ 4,56 sen per kWh untuk kapasitas di atas 100 MW, US\$ 5,57 sen untuk kapasitas 50-100 MW, US\$ 6,26 sen untuk kapasitas 10-50 MW, dan paling tinggi US\$ 6,8 sen per kWh untuk kapasitas hingga 10 MW. Namun, khusus panas bumi, pemerintah dapat melakukan eksplorasi atau memberikan kompensasi biaya eksplorasi dan pengembangan infrastruktur kepada pengembang.

Cukup Menarik

Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengungkapkan, rancangan Perpres harga listrik energi terbarukan tersebut



Bus Listrik Transjakarta

Bus listrik Transjakarta yang akan diuji coba di Kantor Pusat Transjakarta, Senin (6/7/2020). Transjakarta melakukan uji coba bus listrik dengan mengangkut penumpang umum dan menerapkan protokol kesehatan, pada rute Blok M - Balai Kota mulai hari ini, Senin (6/7), hingga tiga bulan ke depan. Layanan ini akan beroperasi setiap hari, mulai pukul 10.00 WIB - 22.00 WIB dengan jarak keberangkatan setiap 45 menit sekali dan berhenti di halte-halte Non-BRT di sepanjang rute Blok M hingga Balai Kota Jakarta.

sesuai dengan pembahasan pemerintah dengan pengembang. Jika hingga disahkan beleid ini masih sesuai pembahasan, pihaknya optimis harga listrik energi terbarukan bakal menarik bagi investor.

Menurutnya, salah satu kendala proyek energi terbarukan adalah tidak menariknya investasi di Indonesia mengingat proyek ini butuh biaya besar di awal. "Karena itu, sebagian besar pengusaha sudah menanti terbitnya payung hukum yang memberikan kepastian usaha," kata dia kepada Investor Daily, akhir pekan lalu.

Terkait pengembangan energi terbarukan di Indonesia, tambah Surya Darma, adanya perbaikan

harga listrik tidak menjamin tercapainya bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Namun, perbaikan tersebut bisa menjadi pendorong investasi energi terbarukan agar lebih masif lagi.

"METI bersama asosiasi energi terbarukan sudah menyilakan beberapa proyek yang akan segera diproses untuk bisa mengembangkan energi terbarukan," ujar Surya Darma.

Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi juga mengungkapkan bahwa isi rancangan Perpres untuk harga listrik panas bumi sesuai dengan pembahasan dengan asosiasi. Bagi pihaknya, terlepas dari skema yang dipilih

pemerintah, harga listrik panas bumi harus sesuai dengan keekonomian proyek. Selain itu, aturan yang ada harus memberikan kepastian pengusahaan panas bumi.

Pihaknya sendiri tetap berharap harga listrik panas bumi tetap menggunakan skema *Feed in Tariff* untuk mempercepat pengembangan panas bumi nasional. Pasalnya, skema harga patokan tertinggi tetap akan membutuhkan negosiasi harga dengan PLN begitu kegiatan eksplorasi selesai. Negosiasi ini biasanya memakan waktu cukup lama. Padahal, PLN adalah satu-satunya pembeli listrik.

"Bagi pengembang, ini adalah

risiko terhadap investasi, karena negosiasi dilakukan setelah pengembangan mengeluarkan uang besar untuk membiayai eksplorasi," jelasnya. Pengembangan panas bumi baru optimal, tambahnya, jika ada solusi terkait negosiasi dengan PLN ini.

Pemerintah telah menetapkan target porsi energi terbarukan sebesar 23% dalam bauran energi nasional di 2025 nanti. Pemerintah berkomitmen meningkatkan penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 9.051 MW dalam lima tahun. Kebutuhan investasi untuk merealisasikan target tersebut mencapai sekitar US\$ 20 miliar.

PLN Gandeng KBN Percepat Proyek SUTET Tanjung Priok - Muara Tawar

JAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (PLN UIP JBB) dan Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) mendatangi kerjasama terkait Penggunaan Tanah Industri (PPTI). Penggunaan lahan ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan Tower T.42 - T.46 SUTET 500 kV Tanjung Priok - Muara Tawar.

Penandatanganan dilakukan oleh General Manager PLN UIP JBB Ratnasari Sjamsuddin, bersama HM Sattar Taba, selaku Direktur Utama PT KBN pada 25 Juni kemarin. Kerjasama ini berlaku selama 30 tahun dihitung sejak 16 Juni 2020. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan.

"Sebagai salah satu unit yang bergerak di konstruksi infrastruktur kelistrikan, PLN UIP JBB berkomitmen untuk terus bergerak dan mewujudkan pembangunan yang andal sesuai dengan mandat pemerintah," kata Ratnasari dalam keterangannya di Jakarta, pekan lalu.

Tanah seluas 1.125 meter persegi di lahan C.03 KBN Marunda ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan lima tower SUTET



Ratnasari Sjamsuddin

500 kV Tanjung Priok - Muara Tawar. Jalur ini merupakan bagian dari proyek Looping Jakarta.

"Jalur ini sangat krusial dalam rangka memperkuat sistem kelistrikan di Jakarta dan sekitarnya," lanjut Ratnasari.

Jalur SUTET 500 kV ini sendiri merupakan proyek transmisi yang sangat penting untuk meningkatkan keandalan listrik di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Transmisi ini akan membawa energi murah dari pembangkit-pembangkit listrik di bagian utara Jawa, sehingga dapat menekan biaya pokok

penyediaan tenaga listrik.

Kendati masih berada di situasi pandemi Covid-19, PLN UIP JBB tidak berhenti untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Dalam kurun empat bulan terakhir, PLN UIP JBB mencatat prestasi dengan keberhasilan pemberian tegangan (*energize*) pada 9 proyek. Diantaranya adalah GIS-TET 500 kV Tambun 2, SUTET 500 kV Tambun 2 Incomer, Gas Insulated Substation (GIS) 150 kV Bogor Kota, Gardu Induk Kedung Badak, SKTT Kedung Badak - Bogor Kota, SKTT 150 kV Semanggi Timur - Mampang Sirkit I - GIS 150 kV Gandaria II, serta GIS 150 kV Jatiwaringin. "Pandemi tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkarya dan memberikan listrik yang andal untuk Indonesia," jelas Ratnasari.

Sejak tahun 2015, total jaringan transmisi yang berhasil dibangun PLN mengalami peningkatan secara signifikan. Praktis dengan adanya kerjasama antara PLN UIP JBB dengan PT KBN ini, akan ikut serta menyumbang keberhasilan pembangunan jalur transmisi sebagai wujud percepatan program 35.000 MW untuk Indonesia. (rap)

Pengamat Nilai Megaprojek Kilang Pertamina Harus Terus Berjalan

JAKARTA - Megaprojek kilang Pertamina yakni beberapa proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) dan *Grass Roof Refinery* (GRR), harus terus berjalan meski dalam kondisi pandemi Covid-19. Pasalnya, megaprojek kilang tersebut sesuai dengan visi Pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.

"Ini merupakan satu program strategis yang harus tetap dilanjutkan dalam rangka kemandirian energi Indonesia," kata Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan dalam siaran pers, Senin (6/7).

Mamit juga menyampaikan bahwa komitmen Pertamina dalam proyek pembangunan kilang ini tidak perlu diragukan karena ini adalah amanah dari Pemerintah.

"Tidak usah meragukan atau mempertanyakan komitmen Pertamina dalam megaprojek ini. Mereka akan bekerja dengan sebaik-baiknya agar pembangunan kilang ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Kita harus dukung dan kawal pembangunan kilang ini," pungkas Mamit.

Megaprojek kilang tersebut terdiri dari proyek pengembangan kapasitas untuk empat kilang dan pembangunan kilang baru. Pengembangan kapasitas kilang dilakukan di kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian Balongan, Jawa Barat. Dumai di Riau, dan Balikpapan, Kalimantan. Adapun dua kilang baru dibangun di Tuban, Jawa Timur dengan total investasinya US\$ 48 miliar.

"Patut kita apresiasi progres pembangunan kilang yang sedang dilakukan oleh Pertamina terutama untuk progres konstruksi fisik yang dicapai RDMP Balikpapan yang saat ini sudah mencapai 17,41%. Nantinya kapasitas produksi RDMP Balikpapan akan meningkat menjadi 360 ribu barel dan siap beroperasi pada tahun 2023. Untuk RDMP Cilacap dimana saat ini untuk pekerjaan awal phase II sudah 18,94% dan GRR Tuban untuk landclearing lahan sudah 100% dan restorasi pantai 92,51%," jelas Mamit.

Menurut dia, melalui program ini kapasitas pengolahan kilang kita menjadi 1,8 juta BPD dan produksi fuel menjadi 1,5 juta BPD dari saat ini hanya 600.000 BPD pada tahun 2027. Program RDMP dan GRR ini juga menunjukkan keseriusan Pemerintah dan Pertamina dalam mempersiapkan bahan bakar ramah lingkungan dimana produk yang dihasilkan sudah standard EURO V," tukasnya.

Dengan progress pembangunan yang sudah berjalan seperti Kilang Balikpapan, pihaknya

optimis Pertamina akan sanggup menyelesaikan megaprojek tersebut sesuai target yang diberikan oleh Pemerintah.

"Pekerjaan pembangunan kilang baik itu RDMP maupun

GRR tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dilalui seperti persoalan keterbatasan lahan, investasi yang besar, profit jangka panjang, kompleksitas perijinan dan yang pasti sulitnya

mencari mitra strategis. Pembangunan Kilang ini juga harus terintegrasi dengan produk Petrokimia agar semua manfaat dari minyak mentah bisa digunakan," ucapnya. (es)

Hingga Juli, PNBP Minerba Rp17,53 Triliun

JAKARTA - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan mineral dan batu bara belum mencapai 50% pada awal Juli ini. Realisasi penerimaan negara tersebut sebesar Rp 17,53 triliun atau sekitar 48,79% dari target yang ditetapkan tahun ini. Adapun target PNBPT pertambangan yang telah direvisi menjadi Rp 35,93 triliun.

Direktur Penerimaan Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Jonson Pakpahan mengatakan realisasi penerimaan negara hingga 6 Juli kemarin mencapai Rp 17,53 triliun. Dia menegaskan terus berusaha mencapai target yang telah ditetapkan.

"Kami tetap berusaha untuk memenuhi sampai akhir tahun. Sulit ya tapi jadi tantangan," kata Jonson kepada *Investor Daily* di Jakarta, Senin (6/7).

Jonson mengungkapkan tantangan penerimaan negara seiring dengan melemahnya harga batu bara. Pasalnya batu bara merupakan mayoritas berkontribusi dalam penerimaan negara. Dia berharap langkah produsen batu bara memangkas produksi

mampu mendongkrak harga. "Kita berharap berhasil. Supaya harga makin baik," ujarnya.

Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode Juli 2020 sebesar US\$52,16/ton. Harga tersebut terkoreksi tipis dibandingkan pada Juli target yang ditetapkan tahun ini. Adapun target PNBPT pertambangan yang telah direvisi menjadi Rp 35,93 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir sebelumnya mengungkapkan tren harga rendah masih akan berlanjut akibat kekhawatiran kemungkinan gelombang kedua serangan Covid-19 yang dapat kembali menekan pemulihan ekonomi di negara-negara tujuan ekspor batu bara Indonesia seperti ke Tiongkok, India, Jepang, Korea, dan lain-lain.

"Dengan kondisi seperti ini APBI berpendapat perlu segera ada upaya pengendalian produksi melalui pemotongan produksi (*production cut*) dari para produsen batu bara nasional. Pemotongan produksi diharapkan

dapat menekan harga yang terus turun karena semakin melebar *oversupply*," ujarnya.

Menurut kajian APBI, lanjut Pandu, perkiraan produksi batu bara tahun ini sekitar 595 juta ton M/T telah turun menjadi 530 juta M/T di Juni kemarin. Namun demikian, APBI memandang masih diperlukan pengendalian produksi nasional dengan adanya tambahan pemangkasan produksi sampai dengan 50 jt M/T sehingga produksi batu bara nasional menjadi sekitar 480 juta M/T agar tercapai keseimbangan suplai dan permintaan pada global seaborne market.

Dikatakannya sengan kondisi permintaan yang masih belum membaik, maka untuk menjaga profitabilitas, para produsen besar (major producers) anggota APBI telah berencana untuk melakukan pemotongan produksi tahun 2020 sebesar 15-20% dari rencana awal. Pemotongan produksi ini diharapkan dapat mendongkrak harga batu bara global dengan tercapai keseimbangan suplai dan permintaan pada global seaborne market. (rap)



<https://www.kencanaenergy.com>

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KENCANA ENERGI LESTARI Tbk

Direksi PT Kencana Energi Lestari Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : BALLROOM MAQNA RESIDENCE JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 88 RT. 1/RW.5 KEL. MERUYA RAYA, KEC. KEMBANGAN, DKI JAKARTA 11610

Dengan mata acara sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).
- Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).
- Penetapan paket remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Penjelasan mata acara sebagai berikut:

- Mata acara RUPST ke-1 sampai ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UU nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPST ke-5 adalah untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas, per 31 Desember 2019.

Untuk selanjutnya RUPS Tahunan akan disebut "Rapat".

Catatan perihal Rapat :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di halaman situs Perseroan www.kencanaenergy.com.
- Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Senin, 6 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Sebagai langkah preventif atas pandemik Covid-19, Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Physical Distancing* dan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat dilaksanakan serta mengacu kepada tata tertib Rapat dan tindakan preventif penyebaran Covid-19 dalam rangka mengutamakan kesehatan semua pihak.
- Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
 - Surat Kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.kencanaenergy.com
 - Surat Kuasa Konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat diemail ke corporate.secretary@kencanaenergy.com. Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim ke Perseroan selambat-lambatnya pada **Jum'at, 24 Juli 2020**, dituliskan kepada **Bapak - Direktur & Corporate Secretary** Perseroan, pada alamat sebagai berikut:

Kencana Tower
Lantai 11 Business Park Kebon Jeruk,
Jl. Meruya Ilir Raya No. 88, Jakarta Barat 11620.

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya pada **Jum'at, 24 Juli 2020**.

- Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Penyiapan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Selasa, 28 Juli 2020, pukul 12.00 WIB**. Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Selasa, 28 Juli 2020**.
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Fotokopi Anggaran Dasar terakhir berikut bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
 - Fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti pemberitahuan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 - Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan). Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedudukan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahan Rapat dapat diperoleh/diunduh di website Perseroan: www.kencanaenergy.com sejak tanggal panggilan ini.
- Demikian pertimbangan kesehatan dan dalam kerangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan tanda terima (*souvenir*) kepada pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
- Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat hadir di ruang Rapat 45 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 13.15 WIB.

Jakarta, 7 Juli 2020

PT Kencana Energi Lestari Tbk
Direksi